

# RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN NGAWI**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR     TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi membuat Rencana Kerja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi menyusun Dokumen Rencana Kerja 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

#### 1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

#### 1.1.3 Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

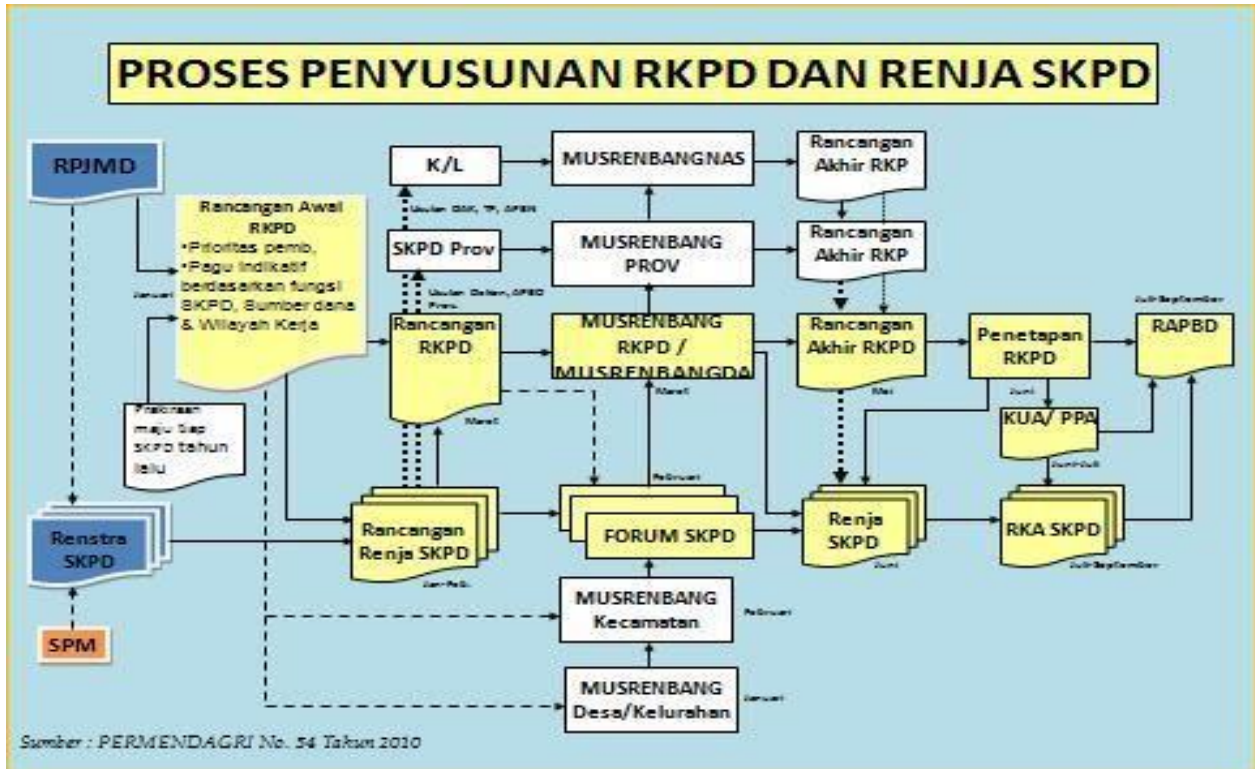
merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan:

1. Arah Pembangunan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2025 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke-4 (ke-empat) yaitu “Pengembangan Teknologi Guna Mewujudkan Kabupaten Ngawi yang Sejahtera”;
2. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan IV dan Tahun 2021 Triwulan IV;
3. Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
4. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
5. Isu-isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Ngawi yang berkembang saat ini dan prediksi pada masa mendatang.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi itulah diperlukan suatu dokumen rencana kerja yang menguraikan program dan kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas. Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Gambar 1).



Gambar 1.

Alur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Selain itu proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Rencana Strategis, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja, dan Penetapan Rencana Kerja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.



## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini disusun dengan berdasarkan pada peraturan perundangan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317.Tahun 2023;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 9);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
- l. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32);
- m. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 10);
- n. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 145 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 145 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 71);
- o. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun, tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2024;
4. Meningkatkan Pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberian perizinan, sosialisasi dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Bab ini memuat:

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Landasan Hukum

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023 dan dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya. Bab ini memuat:



- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran yang berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Bab ini memuat:

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan.

### BAB V Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 20222.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja tahun sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja yang bersifat *outcome* dan *output*. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang di hadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang akan dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan
- d. Kebijakan-kebijakan dalam melaksanakannya.

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 juga memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Triwulan IV Periode Pelaksanaan Tahun 2022																															
No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2022		Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD		Tingkat Capaian Kinerja Dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
				5	6	7	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	0	0	0	NON URUSAN																											
1	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																											
0	0	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																											
0	0	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun	4,00	Dokumen	30.065.450	0	0	4,00	30.065.450	2,00	20.410.950	0	4.415.000	2,00	0	0	5.220.000	4,00	30.045.950	100,00	100	4,00	30.045.950	100	99,94	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	11,00	Dokumen	30.065.450	0	0	11,00		7,00		4,00	0	0	0	0	11,00		100,00		11,00		100		100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
0	0	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan OPD yang disusun	6,00	Dokumen	760	0	0	6,00	760	3,00	0	3,00	760	0	0	0	6,00	760	100,00	100	6,00	760.000	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
0	0	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																											
0	0	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan non ASN yang disusun	26,00	Dokumen	4.776.527.310	0	0	26,00	4.776.527.310	6,00	402.398.800	8,00	1.683.043.254	6,00	1.134.309.331	6,00	1.027.687.473	26,00	4.247.438.858	100,00	89	26,00	4.247.438.858	100	88,92	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1.118,0	Kali	4.776.527.310	0	0	1.118,0	0	279,00		279,00		279,00		281,00		1.118,0	0	100,00		1.118,0	0	100		100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
0	0	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1,00	Dokumen	16.213.600	0	0	1,00	16.213.600	0	0	0	0	0	0	1,00	15.757.200	1,00	15.757.200	100,00	97	1,00	15.757.200	100	97,19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
0	0	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																											
0	0	1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah sosialisasi yang diadakan	0	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
0	0	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																											
0	0	1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100	%	2.052.050	0	0	100	2.052.050	100	2.052.050	0	0	0	0	0	0	100	2.052.050	100,00	100	100	2.052.050	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
0	0	1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	10.832.500	0	0	100	10.832.500	30,00	3.250.000	0	30,00	3.250.000	40,00	4.332.500	100	10.832.500	100,00	100	100	10.832.500	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
0	0	1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah air isi ulang yang disediakan	100	Galon	19.857.000	0	0	100	19.857.000	50,00	2.643.000	0	0	50,00	2.643.000	0	14.526.000	100	19.812.000	100,00	100	100	19.812.000	100	99,77	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						Jumlah makanan yang disediakan	600	Kotak	19.857.000	0	0	600		300		0	300		0	0	600		100,00		600		100		100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						Jumlah minuman yang disediakan	100	Botol/ Dus	19.857.000	0	0	100		50,00		0	50,00		0	0	100		100,00		100		100		100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
0	0	1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang yang Dicitak	70,00	Lembar	5.901.500	0	0	70,00	5.901.500	70,00	0	0	1.146.000	0	0	0	4.750.000	70,00	5.896.000	100,00	100	70,00	5.896.000	100	99,91	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						Jumlah Barang yang Digandakan	5.206,0	Lembar	5.901.500	0	0	5.206,0	0	1		1,5	2.690,0	0	16,00	0	5.206,0	0	100,00		5.206,0	0	100		100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						Jumlah iklan/publikasi media cetak	1,00	Kali	5.901.500	0	0	1,00		0		1,00	0	0	0	0	1,00		100,00		1,00		100		100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
0	0	1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah buku peraturan perundang undangan yang disediakan	0	Buku	1.944.000	0	0	0	1.944.000	0	0	0	0	0	0	0	1.860.000	0	1.860.000	0,00	96	0	1.860.000	0	95,68	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						Jumlah Surat Kabar yang Disediakan	80,00	Eksemplar	1.944.000	0	0	80,00		0		0	0	0	80,00	0	80,00		100,00		80,00		100		100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
0	0	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah yang Dihadiri/Dikuti		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah yang Dihadiri/Dikuti	34,00	Kali	66.194.200	0	0	34,00	66.194.200	12,00	8.054.743	0	13.240.040	15,00	13.394.461	7,00	30.471.594	34,00	65.160.838	100,00	98	34,00	65.160.838	100	98,44	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang Dihadiri/Dikuti	155,00	Kali	66.194.200	0	0	155,00		50,00		50,00	0	0	55,00	0	155,00		100,00		155,00		100		100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
0	0	1	2.07	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																											
0	0	1	05	Penggadaan Mebel		Jumlah meubelair yang diadakan	5,00	Unit	2.452.000	0	0	5,00	2.452.000	0	0	3,00	2.452.000	2,00	0	0	0	5,00	2.452.000	100,00	100	5,00	2.452.000	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	

No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2022		Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD		Tingkat Capaian Kinerja Dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%				14 = 6+12		15 = 14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	0 0 1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	6,00	Unit	900	0	0	6,00	900	0	900	0	0	0	0	0	0	6,00	900.000	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	0 0 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
	0 0 1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar	12,00	Rekening	91.385.050	0	0	12,00	91.385.050	3,00	11.793.326	2,00	11.715.404	4,00	7.836.494	3,00	55.347.530	12,00	86.692.754	100,00	95	12,00	86.692.754	100	94,87	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah rekening internet yang dibayar	24,00	Rekening	91.385.050	0	0	24,00	91.385.050	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	24,00	100,00		24,00	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
			Jumlah rekening listrik yang dibayar	48,00	Rekening	91.385.050	0	0	48,00	91.385.050	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	48,00	100,00		48,00	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
			Jumlah rekening telepon yang dibayar	12,00	Rekening	91.385.050	0	0	12,00	91.385.050	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	100,00		12,00	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	0 0 1 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	27,00	Jenis	63.696.200	0	0	27,00	63.696.200	4,00	11.196.200	23,00	15.750.000	0	5.250.000	0	31.500.000	27,00	63.696.200	100,00	100	27,00	63.696.200	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	10,00	Jenis	63.696.200	0	0	10,00	63.696.200	3,00	7,00	7,00	0	0	0	0	10,00	10,00	100,00		10,00	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
			Jumlah pembayaran jasa keamanan	24,00	Kali	63.696.200	0	0	24,00	63.696.200	12,00	0	0	2,00	2,00	10,00	24,00	24,00	100,00		24,00	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
			Jumlah pembayaran jasa kebersihan	24,00	Kali	63.696.200	0	0	24,00	63.696.200	12,00	0	0	2,00	2,00	10,00	24,00	24,00	100,00		24,00	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	0 0 1 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor	92,00	Kali	118.146.000	0	0	92,00	118.146.000	30,00	18.058.000	5,00	24.612.000	30,00	9.104.000	27,00	66.372.000	92,00	118.146.000	100,00	100	92,00	118.146.000	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah pembayaran lembur	84,00	Kali	118.146.000	0	0	84,00	118.146.000	28,00	0	0	30,00	30,00	26,00	84,00	84,00	100,00		84,00	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
			Jumlah pembayaran jasa operator	0	Kali	118.146.000	0	0	0	118.146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	0 0 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
	0 0 1 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya	1,00	Unit	13.550.500	0	0	1,00	13.550.500	1,00	2.024.300	0	2.667.680	0	0	0	8.460.800	1,00	13.152.780	100,00	97	1,00	13.152.780	100	97,06	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	1,00	Unit	13.550.500	0	0	1,00	13.550.500	0	1,00	1,00	0	0	0	1,00	1,00	100,00		1,00	100	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	0 0 1 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	2,00	Unit	5.588.900	0	0	2,00	5.588.900	1,00	864	1,00	0	0	0	4.214.300	2,00	5.078.600	100,00	91	2,00	5.078.600	100	90,87	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2,00	Unit	5.588.900	0	0	2,00	5.588.900	2,00	0	0	0	0	0	2,00	2,00	100,00		2,00	100	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	0 0 1 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	28,00	Kali	9.000.000	0	0	28,00	9.000.000	0	0	24,00	3.000.000	0	0	4,00	6.000.000	28,00	9.000.000	100,00	100	28,00	9.000.000	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	0 0 1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	14,00	Unit	1.220.000	0	0	14,00	1.220.000	14,00	0	0	1.220.000	0	0	0	14,00	1.220.000	100,00	100	14,00	1.220.000	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																92.11	98.03			92.11	98.03							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																									
2	2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM																								
2	17	2	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota																								
2	17	2	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mengajukan permohonan rekomendasi perijinan	5,00	Koperasi	59.886.000	0	0	5,00	59.886.000	0	0	0	59.836.000	3,00	0	5,00	59.836.000	100,00	100	5,00	59.836.000	100	99,92	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100	99.92			100	99.92							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							





No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2022		Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD		Tingkat Capaian Kinerja Dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%				14 = 6+12		15 = 14/5x100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2 17 7 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pemetaan Usaha Mikro	1,00	Dokumen	148.500.000	0	0	1,00	148.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1,00	148.500.000	100,00	100	1,00	148.500.000	100	99,97	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
			Jumlah Peserta pelatihan yang Mendapatkan Nilai 75	0	Orang	148.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
			Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	9,40	%	148.500.000	0	0	9,40	0	0	0	2,30	7,10	0	0	9,40	100,00	0	0	9,40	100	100	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
			Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)	55,30	%	148.500.000	0	0	55,30	0	0	0	22,20	33,10	0	0	55,30	100,00	0	0	55,30	100	100	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
2	17 7 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Kemitraannya	10,00	UM	96.630.000	0	0	10,00	96.630.000	0	0	3,00	94.585.500	6,00	0	1,00	1.990.000	10,00	96.575.500	100,00	100	10,00	96.575.500	100	99,94	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
			Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1,10	%	96.630.000	0	0	1,10	0	0	0,54	0,20	0,36	0,36	0,36	1,10	100,00	0	0	1,10	100	100	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
2	17 7 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitas perijinan	10,00	UM	91.500.000	0	0	10,00	91.500.000	0	0	0	64.419.000	8,00	0	21.475.000	2,00	5.500.000	10,00	91.394.000	100,00	100	10,00	91.394.000	100	99,88	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17 7 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti hasil sosialisasi pembiayaan	90,00	UM	163.370.000	0	0	90,00	163.370.000	0	0	0	0	0	0	0	90,00	163.370.000	100,00	100	90,00	163.370.000	100	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																87,5	99,95			87,5	99,95								
Predikat Kinerja																Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi								
8	2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM																											
2	17 8 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																											
2	17 8 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	10,00	UM	904.999.200	0	0	10,00	904.999.200	0	0	0	248.391.300	4,00	0	256.022.005	6,00	398.074.960	10,00	902.488.265	100,00	100	10,00	902.488.265	100	99,72	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti pelatihan	585,00	UM	904.999.200	0	0	585,00	0	0	90,00	0	95,00	400	0	585,00	100,00	0	0	585,00	100	100	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
			Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti sosialisasi	25,00	UM	904.999.200	0	0	25,00	0	0	0	0	9,00	16,00	0	25,00	100,00	0	0	25,00	100	100	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100	99,72			100	99,72								
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																											
9	3 32 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																											
3	32 3 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																											
3	32 3 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data administrasi pendaftaran transmigran	1,00	Dokumen	10.000.200	0	0	1,00	10.000.200	0	0	0	7.537.200	1,00	0	1.989.000	0	0	1,00	9.526.200	100,00	95	1,00	9.526.200	100	95,26	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah peninjauan, monitoring dan pengawalan ketransmigrasian	1,00	Lokasi	10.000.200	0	0	1,00	0	0	0	0	0	1,00	0	1,00	100,00	0	0	1,00	100	100	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100	95,26			100	95,26								
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)																97,73	99,07			97,73	99,07								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :-																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :-																													
Tindak Lanjut Yang Di Perluakan Dalam Triwulan Berikutnya :-																													
Tindak Lanjut Yang Di Perluakan Dalam Renja PD Berikutnya :-																													

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/ keluaran dari program/ kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi Satuan Kinerja Perangkat Daerah.

Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi berdasar indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun serta proyeksi capaian indikator kinerja utama pada tahun 2022 dan 2023 yang berdasar pada Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dan perubahan Rencana Strategis.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Ngawi**

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra Dinkop				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			80,15	80,25	80,35	80,45	86,50				
2	Presentase Pertumbuhan jumlah koperasi baru berbasis agropolitan			20%				113,3%				
3	Persentase Koperasi yang berkualitas		Persentase koperasi yang berkualitas	70%	75%	80%	85%	92,17%		80%	85%	
4	Presentase Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan			33%				83,33%				
5	Jumlah Usaha mikro mengalami kenaikan omset			75 UM				75 UM				
6	Persentase UKM yang meningkat omsetnya				6,5%	6,7%	6,9%			6,7%	6,9%	
7	Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi			78%	81%	84%	87%	100%		84%	87%	
8			Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24%	40%	60%	80%	24,14%		60%	80%	
9			Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
10			Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	90%	93%	96%	97%	92,17%		96%	97%	
11			Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	90%	93%	96%	97%	92,17%		96%	97%	
12			Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	90%	93%	96%	97%	97,39%		96%	97%	

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra Dinkop				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	
13			Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2%	3%	4%	5%	2,31%		4%	5%	
14			Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	90%	93%	96%	97%	92,17%		96%	97%	
15			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan									
16			Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	80%	85%	90%	95%	81,04%		90%	95%	
17			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5%	5,2%	5,4%	5,6%	5,22%		5,4%	5,6%	
18			Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5%	5,2%	5,4%	5,6%	5,22%		5,4%	5,6%	
19			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5%	5,2%	5,4%	5,6%	5,22%		5,4%	5,6%	
20			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5%	5,2%	5,4%	5,6%	5,22%		5,4%	5,6%	
21			Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	50%	55%	60%	65%	51,01%		60%	65%	

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra Dinkop				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	
22			Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	30%	45%	60%	75%	32,42%		60%	75%	
23			Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	81%	85%	90%	95%	81,72%		90%	95%	
24			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	16%	20%	30%	40%	16,58%		30%	40%	
25			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	58%	70%	80%	90%	58,04%		80%	90%	
26			Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	32%	50%	60%	70%	32,42%		60%	70%	
27			Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	6%	9%	12%	15%	6,68%		12%	15%	

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022, yaitu:

1. Tabel 2.1

Merupakan realisasi atas Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 yang didasarkan pada Rencana Strategis Perubahan 2016-2021. Pada Tahun 2022 terdapat 9 (sembilan) program dengan 15 kegiatan dan 32 subkegiatan secara umum capaian kinerja tercapai 97,73%. Sedangkan rata-rata capaian anggaran tercapai 99,07% merupakan capaian realisasi anggaran yang sangat tinggi.

2. Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022 Merupakan realisasi atas Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang didasarkan pada Rencana Strategis Perubahan 2021 – 2026. Pada Tahun 2022 terdapat 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara keseluruhan memenuhi target, yaitu pada indikator:

a) Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Target: 80,15, realisasi: 86,50 (107,93%)

b) Presentase Pertumbuhan jumlah koperasi baru terutama berbasis agropolitan

Target: 20%, realisasi: 113,3% (566,5%)

c) Persentase koperasi yang berkualitas

Target: 70%, realisasi: 92,17% (131,67%)

d) Presentase Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan

Target: 33%, realisasi: 83,33% (252,51%)

e) Jumlah Usaha Mikro yang mengalami kenaikan omset

Target: 75 UM, realisasi 75 UM (100%)

f) Persentase transmigran yang bertahan di lokasi transmigrasi

Target: 78%, realisasi: 100% (128,20%)

Untuk Tahun 2022 mengacu Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 – 2026 dan Tahun 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

Dengan memperhatikan ketersediaan Sumber Daya Manusia dan tingkat pendidikan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi saat ini masih perlu ditingkatkan, Dinas Koperasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
2. Secara internal kendala yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia aparatur pengelola kegiatan;
3. Kurangnya tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
4. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi;
5. Kurangnya inovasi dan kualitas produk Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
6. Kurangnya permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah;
8. Rendahnya daya saing produk Usaha Kecil Menengah dalam menghadapi dampak global.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi mempunyai isu-isu strategis yang dapat dilakukan dalam pembangunan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi mendatang antara lain sebagai berikut:

1. Kapasitas dan produktifitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang masih sangat terbatas. Produktifitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung.
2. Optimalisasi sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan representasi dari fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah bagi pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

3. Kualitas kelembagaan koperasi. Kelembagaan koperasi yang semakin berkualitas akan meningkatkan produktifitas koperasi tersebut dan secara tidak langsung akan semakin tertata dengan baik.
4. Penguatan kelompok-kelompok strategis sebagai embrio koperasi. Dalam meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian, maka dilakukan penguatan kapasitas kelompok-kelompok strategis dan potensial untuk diberdayakan menjadi embrio koperasi, diantaranya kelompok pengajian, kelompok masyarakat desa hutan, dan lain-lain.
5. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
7. Kesejahteraan pemerataan pertumbuhan: kemiskinan, pengangguran dan kerentanan ekonomi masyarakat desa.
8. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan.
9. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
10. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan usaha mikro yang berkompeten.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, karena beberapa koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik dimana dalam pendiriannya belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota, namun lebih menekankan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi yang menjadi landasan operasionalnya.
- b. Ketertinggalan kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang disebabkan karena kurangmuya kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- c. Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro yang bermodal kecil yang umumnya tidak

berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana, dan belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang struktur kelembagaan dan insentif yang unik/ khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar.

- d. Masih terbatasnya pemasaran produk unggulan usaha mikro ditingkat lokal dan regional, diharapkan dengan fasilitas yang disediakan bisa benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk lebih mempromosikan produknya sehingga bisa lebih dikenal masyarakat luas.

Adapun tantangan dan peluang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
  - a. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - c. Adanya dukungan *stakeholder* dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
2. Ancaman/ Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:
  - a. Kurangnya koordinasi antar lembaga / instansi.
  - b. Peraturan yang tidak konsisten.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Program dan kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan program usulan setelah penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kabupaten Ngawi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Ngawi		Rancangan awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg		
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	13,312,670,222.60	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	6,295,534,481.00	
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	6,717,679,222.60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	29,990,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	64,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	20,900,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	20,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	9,090,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	163,720,000.00	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	12,400,000.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	48,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	12,400,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinkop & UKM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	15,720,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinkop & UKM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	45,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 orang	55,000,000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	380,000,000.00	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	111,829,300.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	30,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	2,497,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	66,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	13,663,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	38,350,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	11,749,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	8,669,300	
			Jumlah Barang yang Digandakan	5220 Lembar				Jumlah iklan/publikasi media	1 Kali		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	21,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	5,580,000	



No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	2,650,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	
			Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	100 Kotak							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	195,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	69,651,000	
			Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	100 Kotak							
	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun</b>	<b>100%</b>	<b>348,000,000.00</b>	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun</b>	<b>100%</b>	<b>1,322,869.00</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	36,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	160,500,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Mebel	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	25,000,000	Pengadaan Mebel	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	65,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1,322,869	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	41,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun</b>	<b>100%</b>	<b>318,000,640.00</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun</b>	<b>100%</b>	<b>240,582,610.00</b>	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	96,000,640	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	50,128,610	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	46,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	121,136,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	176,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	69,318,000	
	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun</b>	<b>100%</b>	<b>234,000,000.00</b>	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun</b>	<b>100%</b>	<b>34,226,445.00</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkop & UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkop & UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15,776,445	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkop & UKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit	56,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkop & UKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit	4,800,000	
	Pemeliharaan Mebel	Dinkop & UKM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5,000,000	Pemeliharaan Mebel	Dinkop & UKM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	31,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	3,650,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	70,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	31,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Cat Ptg	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase fasilitasi penerbitan Izin Usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	70%	120,000,000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase fasilitasi penerbitan izin Usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	70%	66,000,000	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	73%	60,000,000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	73%	34,000,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit Usaha	60,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit Usaha	34,000,000	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	60,000,000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	32,000,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha	60,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha	32,000,000	

No	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Cat Ptg	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	85%	350,000,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	85%	141,000,000
			Persentase koperasi yang taat peraturan perundangan	80%				Persentase koperasi yang taat peraturan perundangan	80%	
	Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	63%	350,000,000	Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	63%	141,000,000
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Unit Usaha	80,000,000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	400 Unit Usaha	11,000,000
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kineja	400 Unit Usaha	270,000,000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	400 Unit Usaha	130,000,000
			Jumlah input data koperasi yang RAT sistem NIK	80 Dokumen						
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi	53 KSP/USP	650,000,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi	53 KSP/USP	37,500,000
			Persentase KSP sehat	40.0%				Persentase KSP sehat	40.0%	
	Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	85%	650,000,000	Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	85%	37,500,000
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	53 Unit Usaha	450,000,000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	53 Unit Usaha	35,000,000

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	250 Unit Usaha	200,000,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	400 Unit Usaha	2,500,000	
5	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>70%</b>	<b>2,688,291,000</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>70%</b>	<b>5,000,000</b>	
	Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan latihan perkoperasian	70%	1,338,291,000	Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan latihan perkoperasian	70%	5,000,000	
			<b>Persentase koperasi yang SDM Koperasi berkompeten</b>	<b>70%</b>				<b>Persentase koperasi yang SDM koperasi berkompeten</b>	<b>70%</b>		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Ngawi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	1,338,291,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Ngawi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	5,000,000	
			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	1220 orang							
			Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	22%							
			Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1%							
			Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	69%							

No	Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan: Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKM yang Menindaklanjuti Pendidikan dan latihan	30%	675,000,000						
			Persentase usaha mikro yang menindaklanjuti hasil sosialisasi akses pembiayaan	15%							
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	110 Orang	675,000,000						
	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKM yang Menindaklanjuti Pendidikan dan latihan	30%	675,000,000						
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	110 Orang	675,000,000						
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	8.5%	390,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	8.5%	505,500,000	
			Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	58.0%				Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	58.0%		
	Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah even yang diikuti untuk peningkatan akses pasar	6 kali	390,000,000,00	Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah even yang diikuti untuk peningkatan akses pasar	6 kali	505,500,000.00	
			Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5.0%				Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5.0%		
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	66.0%				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	66.0%		

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Cat Ptg	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,5%				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,5%		
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	230,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	35 KK		30,500,000
			Jumlah even pameran yang diikuti	6 Kali							
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	1,5%							
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35 Keluarga	160,000,000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit Usaha		475,000,000
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro yang aktif pada tahun berkenaan	100%	1,260,000,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro yang aktif pada tahun berkenaan	100%		408,891,000.00
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	100%				Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	100%		
	Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Usaha Mikro Kecil yang Diberdayakan	100%	1,260,000,000	Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Usaha Mikro Kecil yang Diberdayakan	100%		408,891,000

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target/Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target/Capaian	Kebutuhan Dana	
			Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2-3				Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2-3		
			Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)	73.8%				Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)	73.8%		
			Prosentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1.4%				Prosentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1.4%		
			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	10.1%				Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	10.1%		
			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	5.2%				Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	5.2%		
			Jumlah fasilitas pemberdayaan usaha mikro	14 Kali				Jumlah fasilitas pemberdayaan usaha mikro	14 Kali		
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	500,000,000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0 Unit Usaha		0
			Jumlah Dokumen Pemetaan Usaha Mikro	1 Dokumen							
			Jumlah Peserta pelatihan yang Mendapatkan Nilai 75	150 Orang							
			Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	11.1%							
			Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)	73.8%							
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	9 Unit Usaha	200,000,000	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	10 Unit Usaha		83,309,000
	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	10 Unit Usaha	110,000,000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	8 Unit Usaha		106,582,000



No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Cat Ptg	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitas perjinan Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha 8 Unit Usaha	220,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0 Unit Usaha	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang	130,000,000	Pelatihan dan Pendampingan Pemantauan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1 Unit Usaha	5,000,000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinkop & UKM	Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti hasil sosialisasi pembudayaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	110 Unit Usaha 40 Orang	100,000,000	Pemulihan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	3 Unit Usaha	150,000,000	
						Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Dinkop & UKM Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha 0 Unit Usaha	0 0	
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Dinkop & UKM Dinkop & UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	40 Orang	64,000,000	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		<b>Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset</b> <b>Persentase UMKM yang terakses pasar</b>	<b>225 UM</b> <b>100%</b>	<b>696,700,000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		<b>Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset</b> <b>Persentase UMKM yang terakses pasar</b>	<b>225 UM</b> <b>100%</b>	<b>110,045,000</b>	
	<b>Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>		Presentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	4.2%	696,700,000	<b>Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>		Presentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	4.2%	110,045,000	
			Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	1295:2711				Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	1295:2711		

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Cat Ptg	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
			Jumlah usaha mikro yang mengalami perkembangan produk	75				Jumlah usaha mikro yang mengalami perkembangan produk	75		
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab.Ngawi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang T erfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	696.700.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab.Ngawi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 Unit Usaha	110,045,000	
			Jumlah Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	10 UM							
			Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti pelatihan	50 UM							
			Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti sosialisasi	25 UM							
9	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan</b>	<b>100%</b>	<b>440.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	
	<b>Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan</b>		<b>440.000.000</b>	<b>Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan</b>		<b>10.000.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	22.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000	
	Penyapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan T ransmigran	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman T ransmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	22.000.000	Penyapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan T ransmigran	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman T ransmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	0 Dokumen	0	
	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan T ransmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki T anah dan Rumah di Kawasan T ransmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi T ransmigran Penduduk Setempat (TPS)	14 KK	22.000.000	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan T ransmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki T anah dan Rumah di Kawasan T ransmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi T ransmigran Penduduk Setempat (TPS)	0 KK	0	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan transmigrasi	14 KK	22,000,000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan transmigrasi	0 KK	0
	Penyuluhan Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	15 KK	22,000,000	Penyuluhan Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0 KK	0
	Pelatihan Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	15 Orang	22,000,000	Pelatihan Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	0 Orang	0
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	15 KK	22,000,000	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	0 KK	0
	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	15 KK	22,000,000	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	0 KK	0
	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	1 Lokasi	22,000,000	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	0 Lokasi	0
	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	15 Orang	22,000,000	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	0 Orang	0
	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	15 KK	22,000,000	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	0 KK	0
	Fasilitas Pelatihan Calon Transmigran	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	15 KK	22,000,000	Fasilitas Pelatihan Calon Transmigran	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	0 KK	0
	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)	15 KK	22,000,000	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)	0 KK	0

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	15 KK	22,000,000	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	0 KK	0	
	Penampungan Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal	15 KK	22,000,000	Penampungan Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal	0 KK	0	
	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	15 KK	22,000,000	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	0 KK	0	
	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	15 Orang	22,000,000	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	0 Orang	0	
	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	15 KK	22,000,000	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	0 KK	0	
	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	15 Paket	22,000,000	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	0 Paket	0	
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	22,000,000	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0 Lokasi	0	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berasal dari internal faktor yaitu:

1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah pada sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut, telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan, irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas infrastruktur penunjang pariwisata;
2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/ karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara;
3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga listrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
4. Pemerataan Pembangunan Antarwilayah, berorientasi pada peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah;
5. Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Ngawi yang akan mengancam kelestarian ekosistem, keadaan ini akan sangat memperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu menjamin kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan akibat aktivitas pertambangan rakyat dan perusahaan; dan

6. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2024 terdapat beberapa inovasi perencanaan kedepan yaitu:

- a) Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK yang konsisten dalam penganggaran dan pelaksanaannya,
- b) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
- c) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel,
- d) Kemampuan dalam menghadapi multidimensi kedepan dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan,
- e) Pemantapan komunikasi publik dan *stakeholders* tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategik pembangunan,
- f) Pemantapan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku Motivator, Koordinator, Administrator serta Agen Perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Musyawaran Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan telah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing wilayah kecamatan. Dalam urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan Anggaran.

Beberapa usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari usulan Dewan maupun Masyarakat yang belum dapat di akomodir karena terbatas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah namun untuk merespon kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maka di berikan kegiatan yang dapat membina dan memberdayakan masyarakat yaitu pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis peningkatan ketrampilan.

Diakui pula sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas yang didasarkan atas kajian yang komprehensif selain itu juga untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di Kabupaten Ngawi khususnya urusan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah maka peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi sangat dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

**Tabel 2.5**

**Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**

**Kabupaten Ngawi**

Nama PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dsn. Tempursari Barat RT 1 RW 5 Ds. Tambakboyo Kec. Mantingan, Kab. Ngawi	Pondok Pesantren Al-Hikam memiliki Koperasi Pondok Pesantren yang membutuhkan beberapa fasilitas seperti unit usaha simpan pinjam, unit catering, dan sebagainya	Koefisien: 1 Paket; Anggaran: Rp 200.000.000,-	
2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Kepuh, Ds. Gerih, kec. Gerih, Kab. Ngawi	Masih terbatasnya Modal Koperasi - Perlu adanya Bantuan Modal Koperasi Simpan Pinjam Syariah "GERIH"	Koefisien: 1 Paket; Anggaran: Rp 50.000.000,-	

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	dsn. Randusongo ds. Randusongo kec. Gerih, Kab. Ngawi	Perlu adanya fasilitas Permodalan Usaha Koperasi	Koefisien: 1 Paket; Anggaran: Rp 200.000.000,-	
4	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dusun Kedungrejo , Ds. Guyung, kec. Gerih, Kab. Ngawi	Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal - Usaha Catering Pokmas Dapur Ibu	Koefisien: 1 Paket; Anggaran: Rp 50.000.000,-	
5	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dusun Kedungrejo I, Ds. Guyung, kec. Gerih, Kab. Ngawi	Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal - Usaha Persewaan Perlengkapan Hajatan Pokmas Guyub Rukun	Koefisien: 1 Paket; Anggaran: Rp 50.000.000,-	
6	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dusun Kedungrejo, Ds. Klitik, kec. Geneng, Kab. Ngawi	Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal - Usaha Pertukangan Kayu	Koefisien: 1 Paket; Anggaran: Rp 50.000.000,-	



## BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia Tahun 2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur” yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat” dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
- b. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha
- c. Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 dalam rencana program/ kegiatan prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024;

- b. Menjadi petunjuk untuk pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024;
- c. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas seluruh Bidang dan Sekretriats Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena adanya kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	83,35	83,5
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	80%	90%
		Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase UKM yang meningkat omsetnya	6,70%	7,10%
		Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	84%	90%

## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi kedua yaitu Mengembangkan Perekonomian Kerakyatan melalui Kemudahan Investasi, Pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 memiliki peran dalam skema perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi. Hal ini mengharuskan mampu menganalisa capaian kinerja yang masih belum tercapai sehingga pada Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dapat difokuskan untuk pencapaian kondisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Perencanaan Program dan Kegiatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya. Untuk memecahkan isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah. Program non urusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi sebanyak 9 (sembilan) Program dengan 16 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Rencana pendanaan Program Kegiatan Tahun 2023 yaitu Rp 6.231.598.481,- untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 4.571.202.257,- .

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam jangka 1 (satu) tahun telah merencanakan program dan kegiatan prioritas yang dijabarkan dalam bentuk rencana kerja untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi dan mencapai target yang diharapkan serta dukungan pendanaan yang di gambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Ngawi**

Nama PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan Bidang/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				<b>6,231,598,481</b>				<b>12,656,855,022.70</b>				
2	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		100%	5,011,598,481		100%	6,812,501,549			
2	17	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu		100%	29,990,000		100%	90,000,000	
2	17	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	9 Dokumen	20,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Dokumen	64,000,000
2	17	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ngawi	0 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1,500,000
2	17	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ngawi	0 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1,500,000
2	17	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Ngawi	0 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	1,500,000
2	17	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ngawi	0 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	1,500,000
2	17	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	7 Laporan	9,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Laporan	20,000,000
2	17	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100%	4,581,247,257		100%	5,235,601,549	
2	17	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi	40 Orang/ bulan	4,571,202,257	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang/ bulan	5,215,601,548.70
						Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun			26 Dokumen			26 Dokumen	
2	17	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi	1 Laporan	10,045,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10,000,000
2	17	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Ngawi	0 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Laporan	10,000,000
2	17	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun		100%	12,400,000		100%	169,000,000	
2	17	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Ngawi	50 Paket	12,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Paket	50,000,000
2	17	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Ngawi	0 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26 Orang	16,000,000
2	17	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi	0 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	46,000,000

Kode	Urusan Bidang/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi	0 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Orang	57,000,000
2 17 01 2 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun</b>		<b>100%</b>	<b>111,829,300</b>			<b>100%</b>	<b>386,000,000</b>
2 17 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	48 Paket	2,497,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Paket	32,000,000
2 17 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	20 Paket	13,683,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	67,000,000
2 17 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	100 Paket	11,749,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Paket	39,000,000
2 17 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Ngawi	3 Paket	8,669,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	27,000,000
		Jumlah Barang yang Digandakan		5220 Lembar				5230 Lembar	
2 17 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Ngawi	10 Dokumen	5,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	22,000,000
2 17 01 2 06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ngawi	0 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	3,000,000
		Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan		0 Kotak				100 Kotak	
2 17 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi	50 Laporan	69,651,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Laporan	196,000,000
		Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan		100 Kotak				100 Kotak	
2 17 01 2 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun</b>		<b>100%</b>	<b>1,322,869</b>			<b>100%</b>	<b>362,900,000</b>
2 17 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Ngawi	0 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	37,900,000
2 17 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Ngawi	0 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	161,000,000
2 17 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Ngawi	0 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	26,000,000
2 17 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi	1 Unit	1,322,869	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	66,000,000
2 17 01 2 07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi	0 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	42,000,000
2 17 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi	0 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	30,000,000
2 17 01 2 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun</b>		<b>100%</b>	<b>240,582,610</b>			<b>100%</b>	<b>321,000,000</b>
2 17 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Ngawi	48 Laporan	50,128,610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Laporan	97,000,000
2 17 01 2 08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	1 Laporan	121,136,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	47,000,000
2 17 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	15 Laporan	69,318,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Laporan	177,000,000
2 17 01 2 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun</b>		<b>100%</b>	<b>34,226,445</b>			<b>100%</b>	<b>248,000,000</b>

Kode	Urusan Bidang/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Ngawi	1 Unit	15,776,445	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	42,000,000
2 17 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Ngawi	2 Unit	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	57,000,000
2 17 01 2 09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Ngawi	0 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	7,000,000
2 17 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Ngawi	30 Unit	3,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	32,000,000
2 17 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi	2 Unit	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	75,000,000
2 17 01 2 09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Ngawi	0 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	35,000,000
2 17 02	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten</b>		<b>70%</b>	<b>66,000,000</b>			<b>80%</b>	<b>130,000,000</b>
2 17 02 2 01	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</b>		<b>73%</b>	<b>34,000,000</b>			<b>74%</b>	<b>65,000,000</b>
2 17 02 2 01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	6 Unit Usaha	34,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		6 Unit Usaha	65,000,000
		Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi penerbitan ijin		100 Koperasi				100 Koperasi	
2 17 02 2 02	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usp dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</b>		<b>100%</b>	<b>32,000,000</b>				<b>65,000,000</b>
2 17 02 2 02 0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	2 Unit Usaha	32,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		2 Unit Usaha	65,000,000
2 17 03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</b>		<b>85%</b>	<b>141,000,000</b>			<b>90%</b>	<b>375,000,000</b>
2 17 03 2 01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</b>		<b>63%</b>	<b>141,000,000</b>			<b>64%</b>	<b>375,000,000</b>
2 17 03 2 01 0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Ngawi	400 Unit Usaha	11,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		400 Unit Usaha	90,000,000
2 17 03 2 01 0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Ngawi	400 Unit Usaha	130,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		400 Unit Usaha	285,000,000

Kode	Urusan Bidang/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi		53 KSP/USP	37,500,000			53 KSP/USP	750,000,000
		Persentase koperasi yang taat peraturan perundangan		80%				95%	
2 17 04 2 01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang tertib aset		40%	37,500,000			50%	750,000,000
		Persentase koperasi aktif		90%				95%	
2 17 04 2 01 0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Ngawi	53 Unit Usaha	35,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		53 Unit Usaha	500,000,000
2 17 04 2 01 0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Ngawi	250 Unit Usaha	2,500,000	PENDAPATAN TRANSFER		250 Unit Usaha	250,000,000
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat		70%	5,000,000			80%	1,342,057,474
2 17 05 2 01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang SDM koperasi berkompeten		70%	5,000,000			90%	1,342,057,474
2 17 05 2 01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Ngawi	300 Orang	5,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		300 Orang	1,342,057,474
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		1220 Orang				1280 Orang	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		22%				23%	
		Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		1%				1%	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		69%				72%	
		Jumlah fasilitasi pelatihan SDM koperasi		200 Orang				200 Orang	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang di berikan Dukungan Fasilitas Pemasaran		8,5%	505,500,000			9%	410,000,000
		Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya		58%				66%	
2 17 06 2 01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang bertambah usaha koperasi		60%	505,500,000			80%	410,000,000
		Persentase koperasi yang terakses permodalan		60%				80%	
2 17 06 2 01 0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Ngawi	35 KK	30,500,000	PENDAPATAN TRANSFER		40 KK	170,000,000
2 17 06 2 01 0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Ngawi	5 Unit Usaha	475,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		10 Unit Usaha	240,000,000



Kode	Urusan Bidang/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha mikro yang menjadi wirausaha		100%	344,955,000			100%	2,150,000,000
		Persentase usaha mikro yang aktif pada tahun berkenaan		100%				100%	
		Persentase UKM yang memiliki produk unggulan		100%				100%	
		Persentase pertumbuhan UKM		1%				1,2%	
2 17 07 2 01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru		450 WUB	344,955,000			600 WUB	2,150,000,000
		Persentase UKM yang berijin		3,7%				4,7%	
		Persentase UKM yang bermitra		1,4%				1,6%	
		Persentase UKM yang produknya tersertifikasi		10,1%				12%	
		Persentase UKM yang SDMnya bersertifikasi		70%				75,4%	
2 17 07 2 01 0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Ngawi	0 Unit Usaha	-	PENDAPATAN TRANSFER		10 Unit Usaha	205,000,000
2 17 07 2 01 0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Ngawi	10 Unit Usaha	83,309,000	PENDAPATAN TRANSFER		10 Unit Usaha	115,000,000
2 17 07 2 01 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Ngawi	8 Unit Usaha	106,582,000	PENDAPATAN TRANSFER		8 Unit Usaha	225,000,000
2 17 07 2 01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Ngawi	0 Orang	-	PENDAPATAN TRANSFER		120 Orang	135,000,000
2 17 07 2 01 0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kab. Ngawi	20 Unit Usaha	5,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		30 Unit Usaha	70,000,000
2 17 07 2 01 0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kab. Ngawi	15 Unit Usaha	150,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		20 Unit Usaha	500,000,000
2 17 07 2 01 0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kab. Ngawi	0 Unit Usaha	-	PENDAPATAN TRANSFER		120 Unit Usaha	700,000,000
2 17 07 2 01 0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Ngawi	0 Unit Usaha	-	PENDAPATAN TRANSFER		120 Unit Usaha	100,000,000
2 17 07 2 01 0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Ngawi	40 Orang	64,000	PENDAPATAN TRANSFER		50 Orang	100,000,000
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang mengalami perkembangan produk		225 UM	110,045,000			300 UM	227,296,000
		Persentase UKM terakses pasar		100%				100%	
2 17 08 2 01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UKM yang difasilitasi lokasi penjualannya		100%	110,045,000			100%	227,296,000
		Persentase UKM yang terakses media promosi		4,2%				4,4%	
2 17 08 2 01 0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kab. Ngawi	50 Unit Usaha	110,045,000	PENDAPATAN TRANSFER		60 Unit Usaha	227,296,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Calon Transmigrasi yang memenuhi persyaratan		100%	10,000,000			100%	460,000,000
3 32 03 2 01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan		100%	10,000,000			100%	460,000,000
3 32 03 2 01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Ngawi	1 Laporan	10,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Laporan	23,000,000

Kode	Urusan Bidang/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 32 03 2 01 0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Kab. Ngawi	0 Laporan	-	PENDAPATAN TRANSFER		1 Laporan	23,000,000
3 32 03 2 01 0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Kab. Ngawi	0 Kepala Keluarga	-	PENDAPATAN TRANSFER		14 Kepala Keluarga	23,000,000
3 32 03 2 01 0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kab. Ngawi	0 Kepala Keluarga	-	PENDAPATAN TRANSFER		14 Kepala Keluarga	23,000,000
3 32 03 2 01 0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab. Ngawi	0 Kepala Keluarga	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Kepala Keluarga	23,000,000
3 32 03 2 01 0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kab. Ngawi	0 Orang	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Orang	23,000,000
3 32 03 2 01 0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kab. Ngawi	0 Kepala Keluarga	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Kepala Keluarga	23,000,000
3 32 03 2 01 0008	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	Kab. Ngawi	0 KK	-	PENDAPATAN TRANSFER		5 KK	23,000,000
3 32 03 2 01 0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Kab. Ngawi	0 Lokasi	-	PENDAPATAN TRANSFER		1 Lokasi	23,000,000
3 32 03 2 01 0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab. Ngawi	0 Orang	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Orang	23,000,000
3 32 03 2 01 0011	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	Kab. Ngawi	0 Kepala Keluarga	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Kepala Keluarga	23,000,000
3 32 03 2 01 0012	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kab. Ngawi	0 Kepala Keluarga	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Kepala Keluarga	23,000,000
3 32 03 2 01 0013	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)	Kab. Ngawi	0 Kepala Keluarga	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Kepala Keluarga	23,000,000
3 32 03 2 01 0014	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	Kab. Ngawi	0 Kepala Keluarga	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Kepala Keluarga	23,000,000
3 32 03 2 01 0015	Penampungan Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asa	Kab. Ngawi	0 Kepala Keluarga	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Kepala Keluarga	23,000,000
3 32 03 2 01 0016	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	Kab. Ngawi	0 Kepala Keluarga	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Kepala Keluarga	23,000,000
3 32 03 2 01 0017	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	Kab. Ngawi	0 Orang	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Orang	23,000,000
3 32 03 2 01 0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Kab. Ngawi	0 KK	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 KK	23,000,000
3 32 03 2 01 0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan	Kab. Ngawi	0 Paket	-	PENDAPATAN TRANSFER		15 Paket	23,000,000
3 32 03 2 01 0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Ngawi	0 Lokasi	-	PENDAPATAN TRANSFER		1 Lokasi	23,000,000
<b>JUMLAH</b>					<b>6,231,598,481</b>				<b>12,656,855,022.70</b>

Berdasar Tabel 4.1 Anggaran Rencana Tahun 2024 sebesar Rp 6.231.598.481,- dengan 9 Program, 16 Kegiatan, 35 Sub Kegiatan. Sedangkan Anggaran Rencana Tahun 2025 sebesar Rp 12.656.855.022,70,- dengan 9 Program, 16 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi.

## BAB V

## PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

2. Komitmen tersebut selanjutnya harapnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf; dan
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.

## 5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2024, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO